

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Arie Fransyah Adrian

NPP. 29.1968

Asdaf Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Program Studi Kebijakan Publik

Email: arieadrian11@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The increasing number of poverty in Bulungan Regency as a result of the covid-19 virus which makes many people lose their livelihoods. Purpose:* *The increasing number of poverty in Bulungan Regency as a result of the covid-19 virus which makes many people lose their livelihoods. The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of the Bulungan Regency government policy in poverty alleviation through the Family Hope Program (PKH) in Bulungan Regency during the COVID-19 pandemic. Method:* *The qualitative method is the method used in this research with a descriptive approach. The qualitative method is a method for understanding meaning by a number of people or groups of people who are considered to be derived from social or humanitarian problems. Result:* *findings on the implementation of government policies in poverty alleviation through the Family Hope Program during the covid-19 pandemic in Bulungan Regency, namely problems in data collection for the poor and lack of human resources in the distribution of aid. Conclusion:* *The implementation of government policies in poverty alleviation through the Family Hope Program during the COVID-19 pandemic in Bulungan Regency has not been effective because of the lack of human resources, especially in the process of data collection and supervision of the process of distributing PKH funds and the budget in the Family Hope Program there are still people who meet the criteria for the target recipients. PKH but has not received assistance due to limited budget from the government of the Bulungan Regency Social Service, it is hoped that it will be able to provide more understanding to village officials regarding the importance of distributing and managing PKH data.*

Keywords: *implementation, poverty, Family Hope Program (PKH)*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): *Semakin meningkatnya jumlah kemiskinan di Kabupaten Bulungan akibat dari virus covid-19 yang membuat banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Tujuan:* *Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintahan Kabupaten Bulungan dalam penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Bulungan pada masa pandemic covid-19. Metode:* *Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode untuk memahami makna oleh sejumlah masyarakat atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Hasil/Temuan:* *temuan pada Implementasi kebijakan pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan masa pandemic covid-19 di Kabupaten Bulungan yaitu adanya permasalahan dalam pendataan masyarakat miskin dan kurangnya sumberdaya manusia dalam pembagian bantuan.*

Kesimpulan: belumlah efektif karena masih kurangnya sumberdaya manusia, khususnya dalam proses pendataan dan pengwasan proses penyaluran dana PKH serta anggaran dalam Program Keluarga Harapan masih ada masyarakat yang sesuai kriteria sasaran penerima PKH tetapi belum menerima bantuan karena terbatasnya anggaran dari pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bulungan diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih kepada aparat desa mengenai pentingnya penyaluran dan pengelolaan data PKH .

Kata Kunci : implementasi, kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyebaran virus covid-19 di Indonesia sangatlah cepat sehingga pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020 yang berisi tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka menekan angka penyebaran virus covid-19 . Dalam pelaksanaan PSBB tentu membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat mulai dari menjaga jarak, mengurangi aktivitas ditempat umum, menghindari kerumunan serta wajib memakai masker. Seiring berjalannya waktu pemerintah Kembali mengeluarkan kebijakan baru yaitu instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2021 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berisi tentang pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan karena melonjaknya kasus covid-19 yang jumlah penularannya bisa mencapai 10.000 orang hari. Pemberlakuan kebijakan ini jelas sangat berdampak bagi sektor ekonomi karena akan melemahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Peberlakuan jam operasional bagi rumah makan dan pusat perbelanjaan yang membuat pendapatan masyarakat juga sangat kurang, sehingga banyak pekerja yang harus di berhentikan untuk mengurangi pengeluaran.

Pihak pemerintah melakukan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program yang memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, untuk membantu perekonomian masyarakat pemerintah memberikan berbagai macam bantuan sosial. menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi social ekonomi seseorang atau kelompok yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Bantuan sosial juga merupakan upaya pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat miskin untuk menghidupi kebutuhannya sehari hari. Oleh karena itu penyaluran bantuan sosial ini harus cepat dan tepat karena bantuan ini akan sangat membantu bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini juga merupakan upaya pemerintah dalam berpartisipasi sepenuhnya dalam penyelenggaraan program pembangunan. Sehingga dalam penanggulangan tingkat kemiskinan adalah seperangkat Tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan. Program ini juga merupakan bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan Intervensi pihak publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik bersifat fisik, kondisi ekonomi dan situasi kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin tetapi juga membantu masyarakat miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam program pembangunan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karena bantuan sosial yang sangat diharapkan masyarakat oleh tidak dapat tersalurkan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan yang terjadi di pemerintah Kabupaten Bulungan. permasalahannya adalah kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial sebagai panitia

pelaksana bantuan sosial PKH. Sehingga penyaluran bantuan sosial PKH mengalami keterlambatan, selain itu adanya kesalahan dalam pendataan membuat pembagian bantuan PKH tidak merata yang menyebabkan perdebatan di kalangan masyarakat

1.3. Penelitian Terdahulu

Ahmad Nur Bakhtiar dan Zuly Qodi, Implementasi program keluarga harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di kecamatan Berbah Sleman (2013). Penelitian ini berbentuk skripsi. metode deskriptif kualitatif 1. Aspek kepatuhan dalam implementasi program PKH di kecamatan Berbah dapat dilihat dari: a). Aturan pelaksanaan PKH di kecamatan Berbah selain aturan dari pusat, juga diwajibkan untuk mengikuti pertemuan kelompok, b). Komitmen pelaksana terhadap aturan pelaksanaan PKH di kecamatan Berbah tahun 2013 sudah sangat baik, c). Kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan tahapan kegiatan PKH di kecamatan Berbah tahun 2013 sudah bagus, dan 2. Faktor yang berperan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH) di kecamatan Berbah tahun 2013: a). Sumberdaya; untuk sumber dana dengan menggunakan dana APBD I, APBD II, dan swadaya masyarakat, dan untuk sumberdaya manusia dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pedukuhan sudah baik, b). Komunikasi sesama pendamping kalau ada kegiatan saling bantu membantu, c). Sikap Pelaksana apabila ada kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan PKH, maka segera dilakukan perbaikan dengan melakukan validasi data, d). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di kecamatan Berbah petanipetani ikan produksinya sudah bagus, sektor perdagangan juga sudah membaik. Tirta Sinaga, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Selayang (2019). Penelitian ini berbentuk skripsi. Metode deskriptif kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari setiap proses pelaksanaannya yang sudah berjalan dengan lancar. Jika dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut mereka menggunakannya untuk membantu kondisi sosial dan Pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin, membantu biaya Kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan akan dibawah 6 tahun, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan Pendidikan dan kesehatan. Ade Warni Siregar dan karol Teovani Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Batam (studi pada program keluarga harapan di Kecamatan Sagulung) pada tahun 2019. Penelitian ini berbentuk jurnal Metode deskriptif kualitatif Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH) belum sesuai harapan karena manfaat yang diperoleh belum merata. Proses pendataan yang tidak tepat menyebabkan ditemukannya bantuan yang belum tepat sasaran. Faktorfaktor yang menghambat pelaksanaannya antara lain KPM yang tidak berkomitmen untuk memenuhi tugas dan kewajibannya karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan Pendidikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dan masih kurangnya pengkajian ulang oleh penyelenggara kebijakan mengenai data daftar penerima bantuan yang dikirim oleh pusat apakah yang tercantum sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Namun, untuk jangka panjang, Program PKH diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat miskin menuju pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Bulungan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bulungan pada masa pandemi covid-19.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan deksriptif. Metode kualitatif merupakan metode untuk memahami makna oleh sejumlah masarakat atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan Creswell (2014:4).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Penanggulangan kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid -19 Di Kabupaten Bulungan Tahun 2020

Implementasi kebijakan penangulungan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bulungan dengan berdasar pada teori Edward III. Teori tersebut menetapkan 4 variabel dalam implementasi program yang kemudian peneliti kaitkan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di wilayah Kabupaten Bulungan yaitu variabel komunikasi, variable sumber daya, variable disposisi, variable birokrasi. Menurut Abdul Wahab (2005; 65) implementasi dapat diartikan dalam “Tindakan Tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk terciptanya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Dalam undang-undang juga dijelaskan tentang penanganan fakir miskin yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan terhadap fakir miskin, termuat pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumer mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya

3.1.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi dapat mempermudah dalam penyampaian dan penyaluran informasi oleh Dinas Sosial selaku utusan pemerintah terhadap para penerima bantuan PKH atau KPM PKH, dimengerti dengan jelas apa yang dimaksud, tujuan serta bagaimana tata cara pengambilan bantuan PKH. Dimensi dalam variabel komunikasi ini adalah Kegiatan Transmisi, kejelasan, konsistensi.

Transmisi Kebijakan

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi salah pengertian dalam proses transmisi ini, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan berhenti di tengah jalan. Transmisi suatu kebijakan merupakan suatu gambaran tentang bagaimana kebijakan dilakukan oleh pihak pemerintah yang mempengaruhi berbagai aktivitas dalam proses pemerintah sehingga tercapai tujuan yang telah di tetapkan.

Kejelasan Kebijakan

faktor selanjutnya yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah kejelasan kebijakan, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak

membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan program bantuan (pkh) ada dalam peraturan menteri sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan.

Konsistensi dalam menjalankan kebijakan

Konsistensi informasi yang disampaikan adalah perintah ataupun informasi yang diberikan. Dalam pelaksanaannya komunikasi haruslah jelas dan konsistensi agar dapat diterapkan. Apabila perintah yang diberikan berubah-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

3.1.2 Sumber daya

Faktor selanjutnya pada mengimplementasi suatu program adalah sumberdaya tersebut meliputi; sumberdaya manusia (Staf), sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Sumber Daya Anggaran

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan merupakan suatu bentuk kekuasaan formal dan kekuasaan legislate serta kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan pada program ini berupa beberapa wewenang pemerintah Kabupaten Bulungan yang diberikan pelaksana program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.

Sumberdaya Peralatan/Fasilitas

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan, Tinjauan terhadap sumberdaya peralatan/fasilitas yang tersedia pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan pada Bagian Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretariat program Keluarga Harapan.

3.1.3 Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan terbagi menjadi komitmen dari pelaksana dan sikap yang tegas . Jika dikaitkan dengan implemntasi penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Hrapan (PKH) , maka komitmen dari pelaksana bermula dari tingkat kecamatan hingga kementerian pusat dalam hal ini dari pihak kecamatan yang dituju kemudian ke Dinas Sosial Kabupaten Bulungan hingga Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) para tim pelaksana sudah dibentuk secara langsung oleh tim pusa yang kemudian selanjutnya tim kabupaten akan disarankan oleh dinas Sosial kabupaten yang diajukan ke pusat dan dibuat secara surat keputusan menteri untuk tim pelaksaan Program Keluarga Harapan (PHK) dan antara tim pelaksana harus saling melakukan koordinasi dengan fasilittor kecamatan yang telah ditugaskan dalam implementasi program ini dengan kompetensi, integritas, dan loyalitas yang dimiliki terhadap pelaksanaan kebijakan. Efektivitas dan efisiensi anggaran

Komitmen Dari Pelaksana

Komitmen dari pelaksana sudah menjadi dasar yang perlu dilaksanakan oleh para tim pelaksana kebijakan dikarenakan hambatan-hambatan sehingga sikap disiplin dan loyalitas harus diterapkan pada masing-masing tim demi tercapainya pelayanan publik yang baik. Sesuai dengan pada hasil wawancara oleh Kepala Seksi Dinas Sosial Kabupaten Bulungan mengenai komitmen yang harus dimiliki oleh para pejabat.

Sikap Yang Tegas

Dasar sikap yang tegas pada para pelaksana harus dimiliki dikarenakan perbedaan budaya tiap daerah. Supaya tidak terjadi perselisihan konflik dikarenakan miscommunication antara masyarakat dengan tim pelaksana saat program ini berlangsung. Diperlukan adanya sikap tegas untuk memberitahu masyarakat agar tetap bisa tertib saat melakukan antrian proses pembagian bantuan PKH tersebut.

3.1.4 Struktur Birokrasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Struktur Birokrasi merupakan karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang pada badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan suatu kebijakan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang besar dalam mengimplementasikan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) Disusun dengan pendekatan kinerja.

3.1.5 Standar Operasional Proedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah tuntunan bagi setiap implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Struktur 84 organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan akan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

3.1.6 Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Koordinasi merupakan suatu upaya yang sinkron dan teratur demi menyediakan jumlah serta waktu yang tepat, dan juga mengarahkan pelaksanaan untuk bisa melahirkan suatu tindakan yang selaras dan harmonis pada tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bulungan

Dari hasil wawancara diatas penulis menjelaskan tentang kendala yang hadapi dalam pelaksanaan PKH yang yaitu Data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, dimana faktor penghambat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) ini meliputi;

1. pihak pemerintah Kabupaten Bulungan, sebagai pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bulungan yang lambat dalam melakukan verifikasi data hasil musdes atau bahkan merevisi tentang peraturan bupati. Validasi data penerima PKH dan kegiatan BPNT tidak dilakukan secara bersama dengan pihak terkait sehingga nama yang masuk BPNT ada yang tidak di terima setelah dilakukan validasi

oleh Dinas Sosial sebagai penerima bantuan BPNT, sementara nama yang bersangkutan layak untuk menerima bantuan dan mereka merasa berhak untuk mendapat bantuan. Pernyataan ini, dimana pihak pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bulungan adanya keterlambatan melakukan verifikasi dan memvalidasi data yang diterima dari keluarga penerima PKH tahun 2020 dengan data dari Dinas sosial Kabupaten Bulungan tentang penerima PKH dan BPNT sehingga adanya bantuan sosial yang tumpang tindih.

2. Pada kegiatan Bansos yang data sasarannya adanya bertumpang-tindih data, dimana masyarakat menerima bantuan PKH dan BPNT yang tidak mengakui menerima bantuan tersebut 93 sehingga ada penerima yang mendapat dua sumber bantuan ini diketahui setelah yang bersangkutan menerima bantuan tersebut.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan fenomena yang disajikan sebelumnya yaitu terjadinya kenaikan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bulungan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penyelenggaraan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi covid-19. Secara faktual Program Keluarga Harapan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan tingkat kemiskinan yang telah dilaksanakan tetapi angka kemiskinan pada masa pandemi covid-19 masih meningkatkan dan masih perlu beberapa upaya mengoptimalkan kebijakan penanggulangan kemiskinan ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data terhadap permasalahan penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Implementasi kebijakan pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan masa pandemi covid-19 (PKH) di Kabupaten Bulungan belumlah efektif karena masih kurangnya sumberdaya manusia, khususnya dalam proses pendataan dan pengawasan proses penyaluran dana PKH serta anggaran dalam Program Keluarga Harapan masih ada masyarakat yang sesuai kriteria sasaran penerima PKH tetapi belum menerima karena terbatasnya anggaran dari pemerintah.

Terdapat kendala sehingga belum efektifnya implementasi kebijakan pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yakni; adanya data yang kurang akurat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan dana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta dikaitkan dengan data – data yang terkumpul di lapangan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian juga hanya mengambil data dari informan internal Dinas Sosial Kabupaten Bulungan

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (pkh) pada masa pandemi covid-19 di kabupaten bulungan provinsi kalimantan utara.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan staff yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Creswell, J. (2014). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward III, George C (edited), , *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England, 1984

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar
- Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Lain-lainnya

- Bakhtiar, Ahmad Nur, and Zuly Qodir. "Implementasi program keluarga harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di kecamatan Berbah Sleman Tahun 2013." *Journal of Governance and Public Policy* 2.2 (2015): 205-227.
- Bapenas, *RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024*, Kementerian PPN
- Sinaga, Tirtado. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Selayang." (2019)
- Siregar, Ade Warni Rahmadani, and Karol Teovani Lodan. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BATAM (STUDI PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SAGULUNG)." *Sumber* 66 (2019): 4-85.

